



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-64/PK/PK.2/2022 23 Mei 2022  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Batas Waktu Penyampaian Persyaratan Penyaluran DID Tahap I TA 2022

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota  
Sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah mengatur bahwa penyaluran DID diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
    1. Tahap I sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni; dan
    2. Tahap II sebesar 50% dari pagu alokasi paling cepat bulan Juli dengan menyampaikan laporan realisasi tahap I yang menunjukkan penyerapan paling rendah 70% dari dana yang diterima di RKUD.
  - b. Penyaluran DID tahap I dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
    1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan;
    2. Rencana Penggunaan DID tahun berjalan; dan
    3. Laporan Realisasi Penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan DID pada tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni.
  - c. Dalam hal persyaratan penyaluran DID sebagaimana dimaksud pada poin b belum diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, DID tidak disalurkan.
  - d. Persyaratan penyaluran DID disusun dan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
2. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 PMK 160/PMK.07/2021 mengamanatkan bahwa DID TA 2022 digunakan untuk bidang Pendidikan (minimal 10% dari alokasi yang diterima), bidang kesehatan (minimal 21% dari alokasi yang diterima), dan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat namun tidak dapat digunakan untuk mendanai gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium serta perjalanan dinas.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara untuk dapat segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DID tahap I TA 2022 dengan lengkap dan benar melalui aplikasi SIKD sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Sebagai tambahan informasi, dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK. Selain itu,

dimohon agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengalokasian atau penyaluran DID maupun jenis TKDD lainnya dengan meminta imbalan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Adriyanto

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**LAMPIRAN**

Nota Dinas Dirjen Perimbangan Keuangan

Nomor : S- /PK/2022

Tanggal : Mei 2022

**DAFTAR PEMERINTAH DAERAH  
BELUM MEMENUHI PERSYARATAN PENYALURAN DID TAHAP I TA 2022  
(per Jumat 20 Mei 2022)**

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Tahap II 2021	Rencana Penggunaan DID 2022	Perda APBD
1	Kab. Aceh Barat	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
2	Kab. Aceh Singkil	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
3	Kab. Simeulue	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
4	Kota Sabang	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
5	Kab. Gayo Lues	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
6	Kab. Aceh Jaya	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
7	Kab. Bener Meriah	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
8	Provinsi Sumatera Utara	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
9	Kab. Dairi	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
10	Kab. Nias	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
11	Kab. Tapanuli Selatan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
12	Kab. Tapanuli Tengah	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
13	Kab. Toba	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
14	Kota Sibolga	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
15	Kota Tanjung Balai	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
16	Kota Tebing Tinggi	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
17	Kota Padangsidempuan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
18	Kab. Pakpak Bharat	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
19	Kab. Serdang Bedagai	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
20	Kab. Samosir	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
21	Kab. Padang Lawas	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
22	Kab. Padang Lawas Utara	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
23	Kab. Nias Utara	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
24	Kab. Tanah Datar	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
25	Kota Padang Panjang	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
26	Kota Padang	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
27	Kab. Dharmasraya	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
28	Provinsi Riau	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
29	Kab. Indragiri Hilir	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
30	Kab. Indragiri Hulu	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
31	Kab. Kampar	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai



No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Tahap II 2021	Rencana Penggunaan DID 2022	Perda APBD
32	Kab. Kuantan Singingi	Perlu Tindak Lanjut	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
33	Kab. Rokan Hulu	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
34	Kab. Kepulauan Meranti	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
35	Provinsi Jambi	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
36	Kab. Batanghari	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
37	Kab. Kerinci	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
38	Kab. Merangin	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
39	Kab. Muaro Jambi	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
40	Kab. Sarolangun	Perlu Tindak Lanjut	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
41	Kota Sungai Penuh	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
42	Provinsi Sumatera Selatan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
43	Kab. Lahat	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
44	Kab. Musi Rawas	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
45	Kab. Ogan Komering Ulu	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
46	Kota Prabumulih	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
47	Kota Pagar Alam	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
48	Kota Lubuk Linggau	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
49	Kab. Ogan Ilir	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
50	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
51	Provinsi Bengkulu	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
52	Kab. Bengkulu Selatan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
53	Kab. Bengkulu Utara	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
54	Kab. Lampung Barat	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
55	Kab. Mesuji	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
56	Kab. Pesisir Barat	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
57	Provinsi Jawa Barat	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
58	Kab. Bandung	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
59	Kab. Bogor	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
60	Kab. Cirebon	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
61	Kab. Majalengka	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
62	Kab. Purwakarta	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
63	Kab. Sukabumi	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
64	Kab. Sumedang	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
65	Kota Bogor	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
66	Kota Cirebon	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
67	Kota Sukabumi	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
68	Kota Cimahi	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
69	Kota Banjar	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
70	Provinsi Jawa Tengah	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Tahap II 2021	Rencana Penggunaan DID 2022	Perda APBD
71	Kab. Banjarnegara	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
72	Kab. Banyumas	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
73	Kab. Blora	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
74	Kab. Demak	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
75	Kab. Grobogan	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
76	Kab. Jepara	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
77	Kab. Karanganyar	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
78	Kab. Kendal	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
79	Kab. Klaten	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
80	Kab. Kudus	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
81	Kab. Magelang	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
82	Kab. Pekalongan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
83	Kab. Temanggung	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
84	Kab. Wonogiri	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
85	Kab. Wonosobo	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
86	Kota Magelang	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
87	Kota Salatiga	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
88	Kota Tegal	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
89	Kab. Kulon Progo	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
90	Kota Yogyakarta	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
91	Kab. Banyuwangi	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
92	Kab. Bondowoso	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
93	Kab. Gresik	Sudah Menyampaikan	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
94	Kab. Kediri	Sudah Menyampaikan	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
95	Kab. Malang	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
96	Kab. Pacitan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
97	Kab. Probolinggo	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
98	Kab. Sumenep	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
99	Kab. Trenggalek	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
100	Kab. Tuban	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
101	Kota Kediri	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
102	Kota Madiun	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
103	Kota Malang	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
104	Kota Mojokerto	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
105	Kota Pasuruan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
106	Provinsi Kalimantan Barat	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
107	Kab. Bengkayang	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
108	Kab. Landak	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
109	Kab. Kapuas Hulu	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Tahap II 2021	Rencana Penggunaan DID 2022	Perda APBD
110	Kota Pontianak	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
111	Kota Singkawang	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
112	Kab. Sekadau	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
113	Kab. Barito Selatan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
114	Kab. Kapuas	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
115	Kab. Seruyan	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
116	Kab. Murung Raya	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
117	Provinsi Kalimantan Selatan	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
118	Kab. Hulu Sungai Selatan	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
119	Kab. Hulu Sungai Tengah	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
120	Kab. Kotabaru	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
121	Kab. Tabalong	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
122	Kab. Tanah Laut	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
123	Kab. Tapin	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
124	Kab. Tanah Bumbu	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
125	Provinsi Kalimantan Timur	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
126	Kab. Kutai Barat	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
127	Kab. Paser	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
128	Kota Balikpapan	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
129	Kota Bontang	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
130	Kab. Penajam Paser Utara	Sudah Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
131	Kab. Mahakam Ulu	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
132	Provinsi Sulawesi Utara	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
133	Kab. Bolaang Mongondow	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
134	Kab. Minahasa	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
135	Kota Bitung	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
136	Kab. Minahasa Selatan	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
137	Kota Tomohon	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
138	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
139	Kota Kotamobagu	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
140	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
141	Kab. Minahasa Tenggara	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
142	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
143	Kab. Banggai	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
144	Kab. Banggai Kepulauan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
145	Kab. Buol	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
146	Kab. Banggai Laut	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Tahap II 2021	Rencana Penggunaan DID 2022	Perda APBD
147	Kab. Bantaeng	Perlu Tindak Lanjut	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
148	Kab. Barru	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
149	Kab. Bone	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
150	Kab. Enrekang	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
151	Kab. Luwu Utara	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
152	Kab. Maros	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
153	Kota Palopo	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
154	Kab. Sinjai	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
155	Kab. Kepulauan Selayar	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
156	Kab. Sidenreng Rappang	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
157	Kota Pare Pare	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
158	Provinsi Sulawesi Tenggara	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
159	Kota Kendari	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
160	Kota Bau Bau	Perlu Tindak Lanjut	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
161	Kab. Bombana	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
162	Kab. Buton Utara	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
163	Kab. Konawe Kepulauan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
164	Kab. Kolaka Timur	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
165	Kab. Muna Barat	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
166	Kab. Buton Tengah	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
167	Kab. Badung	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
168	Kab. Jembrana	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
169	Kab. Bima	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
170	Kab. Lombok Tengah	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
171	Kab. Lombok Timur	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
172	Kab. Sumbawa	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
173	Kota Mataram	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
174	Kota Bima	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
175	Kab. Alor	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
176	Kab. Ende	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
177	Kab. Kupang	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
178	Kab. Lembata	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
179	Kab. Sikka	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
180	Kab. Sumba Barat	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
181	Kab. Timor Tengah Utara	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
182	Kota Kupang	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
183	Kab. Rote Ndao	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
184	Kab. Nagekeo	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
185	Kab. Sumba Barat Daya	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Tahap II 2021	Rencana Penggunaan DID 2022	Perda APBD
186	Kab. Sumba Tengah	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
187	Kab. Manggarai Timur	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
188	Kab. Malaka	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
189	Provinsi Maluku	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
190	Kab. Kepulauan Tanimbar	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
191	Kab. Maluku Tenggara	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
192	Kab. Buru	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
193	Kab. Seram Bagian Barat	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
194	Kab. Seram Bagian Timur	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
195	Kab. Maluku Barat Daya	Sudah Sesuai	Perlu Tindak Lanjut	Sudah Sesuai
196	Kab. Buru Selatan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
197	Kab. Kepulauan Yapen	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
198	Kota Jayapura	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
199	Kab. Keerom	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
200	Kab. Waropen	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
201	Kab. Supiori	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
202	Kab. Dogiyai	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
203	Kab. Deiyai	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
204	Kab. Halmahera Tengah	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
205	Kab. Halmahera Selatan	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
206	Kab. Kepulauan Sula	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
207	Kab. Pulau Morotai	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
208	Kab. Pulau Taliabu	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
209	Provinsi Banten	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
210	Kab. Lebak	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
211	Kab. Serang	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
212	Kota Cilegon	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
213	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
214	Kab. Belitung	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
215	Kab. Bangka Selatan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
216	Kab. Bangka Tengah	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
217	Kab. Bangka Barat	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
218	Provinsi Gorontalo	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
219	Kab. Boalemo	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
220	Kab. Gorontalo	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai	Sudah Sesuai
221	Kota Gorontalo	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
222	Kab. Pohuwato	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
223	Kab. Bone Bolango	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
224	Provinsi Kepulauan Riau	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai



<b>No</b>	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Laporan Realisasi Tahap II 2021</b>	<b>Rencana Penggunaan DID 2022</b>	<b>Perda APBD</b>
225	Kab. Kepulauan Anambas	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
226	Kab. Manokwari	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
227	Kab. Sorong	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
228	Kab. Raja Ampat	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
229	Kab. Teluk Wondama	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
230	Kab. Maybrat	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
231	Kab. Manokwari Selatan	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
232	Kab. Mamuju Tengah	Sudah Sesuai	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
233	Kab. Bulungan	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
234	Kab. Malinau	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai
235	Kab. Nunukan	Belum Menyampaikan	Belum Menyampaikan	Sudah Sesuai